Telaah Faktor Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Solusi Penyelesaian Akar Permasalahan

Asep Suherman

Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Email : asepsuherman@unib.ac.id

Abstract

There are still widespread cases of violence against adult women and children, but the solutions offered so far are considered not to have touched the root causes of the problem, further comprehensive efforts are still needed to address these problems. The aim is to find out the main causes and solutions to minimize them so that acts of violence against women do not happen again in the future. The type of research used is normative juridical with a conceptual approach, namely studying relevant theories, concepts, and legal principles. Sourced from primary and secondary legal materials. The results obtained are still a lack of public understanding of sexual violence, the location of the incident is far from public monitoring, unhealthy social life, patriarchal culture is still dominant, economic life is less stable, education, religion, and personality are declining. The solution is that there needs to be participation from all parties to realize these weaknesses in a better direction so that in the future there will be no more violence against women.

Keywords: Law, Violencen, Women, Acts.

Abstrak

Masih maraknya kasus kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dewasa dan anak-anak, namun solusi yang ditawarkan selama ini dinilai belum menyentuh akar penyebab permasalahan, masih diperlukan upaya komprehensif lanjutan untuk menjawab permasalahan tersebut. Tujuannya untuk mengetahui penyebab utama dan solusi dalam meminimalisir agar tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak terulang kembali di masa yang akan datang. Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, yakni mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang relevan. Bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Hasil yang diperoleh masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kekerasan seksual, tempat kejadian jauh dari pantauan masyarakat, kehidupan sosial yang tidak sehat, budaya patriarki yang masih dominan, kehidupan ekonomi yang kurang stabil, pendidikan, agama dan kepribadian yang merosot. Solusinya adalah perlu adanya peran serta seluruh pihak agar mewujudkan kelemahan tersebut menuju ke arah yang lebih baik, sehingga kedepannya tidak ada lagi kekerasan yang terjadi kepada kaum perempuan.

Kata Kunci: Hukum, Kekerasan, Perempuan, Tindakan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan kekerasan terhadap perempuan masih sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan statistik data yang terhimpun dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni-PPA), yakni suatu sistem aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Perlindungan Perempuan Dan Anak Republik Indonesia (Kemenppa RI), yang bertujuan untuk mengadakan pendokumentasian data kekerasan secara terpadu dan komprehensif dalam melakukan pencatatan, pelaporan, pendataan, monitoring dan evaluasi. Sistem ini juga menyediakan data yang bersifat *open access* secara *realtime* dan akurat, sehingga informasinya dengan mudah untuk diketahui oleh publik. Sesuai data yang tersaji tersebut, ternyata diperoleh informasi dalam kurun waktu beberapa tahun belakang jumlah kasus kekerasannya terus mengalami peningkatan.

Jumlah kasus tindak pidana kekerasan yang tercatat dan pernah terjadi sejak tahun 2020 ada sebanyak 20.449 kasus dengan jumlah korban perempuan sebanyak 17.574 orang. Pada tahun 2021 ada sebanyak 25.210 kasus dengan jumlah korban perempuan sebanyak 21.753 orang. Pada tahun 2022 ada sebanyak 27.539 kasus dengan jumlah korban perempuan sebanyak 25.053 orang. Pada tahun 2023 ada sebanyak 29.883 kasus dengan jumlah korban perempuan sebanyak 26.161 orang. Dalam tahun berjalan hingga per Januari tahun 2024 sudah tercatat ada sebanyak 11.835 kasus dengan jumlah korban perempuan sebanyak 10.292 orang.¹ Jumlah korban perempuan yang dimaksud terdiri dari dewasa dan anak-anak.

Berdasarkan persentase jumlah kasus kekerasan tersebut, diketahui adanya peningkatan kurang lebih sebesar 0,9% pertahunnya, meskipun persentase kenaikannya tidak signifikan, namun jika dihitung dari kuantitas kasus yang terjadi, kenaikan pertahunnya justru cukup besar. Korban tindakan kekerasan dominan dialami oleh perempuan dibandingkan laki-laki, yakni berkisar antara 81% hingga 92% dari jumlah total kasus yang terjadi setiap tahunnya. Perempuan berada pada posisi yang paling rentan mengalami berbagai tindakan kekerasan dari pihak lain. Tindakan yang dialami korban kekerasan dapat menyebabkan timbulnya kerugian secara ekonomi, fisik, mental dan kesehatan. Kekerasan terhadap perempuan pada prinsipnya merupakan permasalahan bersama baik dalam konteks global maupun domestik yang perlu perhatian serius dan berkelanjutan oleh seluruh pihak terlebih dari pemangku kepentingan.

¹ Kemenpppa Go.Id, Data Kekerasan, <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan> Diakses 1 Februari 2024.

Kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi kepada perempuan mana saja, dimana saja dan kapan saja.² Baik dalam bentuk kekerasan fisik ataupun non fisik sebagai akibat adanya perbedaan peran yang dimiliki.³ Meningkatnya jumlah kasus kekerasan yang dialami perempuan tersebut menunjukkan belum sepenuhnya upaya perlindungan terhadap keamanan perempuan terakomodir dengan baik. Bahkan, sikap acuh tidak acuh akan peristiwa kekerasan tersebut dapat semakin menguatkan stigma negatif yang memperburuk kedudukan perempuan di dalam masyarakat.

Indonesia sebagai salah satu negara yang telah melakukan ratifikasi terhadap *Convention on the Elimination of All Forms of Discriminations Against Women (CEDAW)* melalui UU No. 7-1984, berkewajiban mematuhi segala ketentuan dan prosedural yang menjadi ketetapan dalam instrumen tersebut untuk mengupayakan penghapusan diskriminasi tindak kekerasan terhadap perempuan.⁴ Selain itu, penguatan pencegahan dan perlindungan kekerasan terhadap perempuan diatur pula di berbagai macam instrumen hukum nasional dalam undang-undang (UU). Seperti UU 23-2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. UU 23-2002 beserta perubahannya tentang Perlindungan Anak. UU 12-2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta peraturan terkait lainnya.

Secara normatif UU tersebut memuat ketentuan pidana mengenai larangan bagi setiap orang untuk melakukan tindakan kekerasan terlebih kepada perempuan. Landasan normatif ini menjadi jaminan yang diberikan negara kepada para perempuan untuk mendapatkan dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya oleh siapapun. Namun realitanya, perempuan masih saja menjadi korban kekerasan dan kasusnya cenderung meningkat setiap tahun. Ketentuan dan sanksi pidana terkesan tidak memberikan pengaruh besar terhadap penanganan kasus kekerasan yang terjadi selama ini. Kondisi demikian mengindikasikan adanya kelemahan terhadap sistem penanganan dalam melindungi dan mempromosikan hak-hak kebebasan perempuan, sehingga kasus tindakan kekerasan masih berulang dan sulit dihindari.

Penanganan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak perempuan atas tindakan kekerasan, perlu diupayakan dan membutuhkan peran serta berbagai pihak seperti Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) daerah provinsi kabupaten/kota, Lembaga Swadaya Masyarakat

² Anisa, M. Fedryansyah, Meilanny Budiarti Santoso, Strategi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Situasi Bencana (Studi Kasus Penerapan Strategi Pencegahan Dp3akb Jabar), Share: Social Work *Jurnal*. Vol. 10. No. 2. Hal. 175 - 185.

³ Dini Zulfiani Indrawati, Oktavianus Kondorura, Meuthia Sahda Af, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur, *Jurnal Administrative Reform*, Vol.6, No. 3, September 2018, Hlm. 141-152.

⁴ Okta Windya Ningrum, Yana S. Hijri, Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah), *Jurnal Inovasi Dan Kreatifitas (Jika)* Vol. 1 No. 2 September 2021, Hlm. 109-125.

(LSM), *Womens Crissis Center* (WCC) atau sejenisnya. Terutama oleh aparat penegak hukum agar permasalahan tersebut dapat segera ditindaklanjuti dan menindak pelanggar yang melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rangka menegakan hukum pidana.

Sebaik apapun aturan hukum yang dibuat dan dirumuskan dalam suatu ketentuan perundang-undangan, namun jika tanpa adanya dukungan dan kerjasama berbagai pihak terutama aparat penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan lembaga permasyarakatan, maka penegakan hukum ini tidak akan berjalan optimal sesuai harapan. Para pihak memiliki peran penting dan strategis, secara berkesinambungan dan konsisten melakukan berbagai macam upaya kongkrit agar tindakan berupa kekerasan yang terjadi kepada perempuan tidak terulang kembali kepada perempuan lainnya. Sehingga terciptanya suatu kondisi yang mampu memberikan rasa aman dan nyaman bagi perempuan dalam menjalankan berbagai macam aktivitas baik di ranah domestik maupun di luar rumah.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dapat diangkat berdasarkan latar belakang tersebut adalah mengapa kasus tindak pidana kekerasan terhadap perempuan masih saja terjadi padahal instrumen hukum telah menjamin perlindungan kepada para perempuan dan solusi meminimalisir agar tindakan kekerasan terhadap perempuan tidak terulang kembali di masa mendatang?

METODE

Jenis penelitian yang digunakan yuridis normatif dengan pendekatan konseptual, yakni mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang relevan. Bahan Hukum yang digunakan berupa bahan hukum primer berupa undang-undang dan bahan hukum skunder berupa dokumen yang tidak bersifat autoritatif seperti buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan melalui studi kepustakaan, termasuk studi dokumen dan teknik pendukung lainnya. Bahan yang diperoleh dilakukan analisis sesuai objek kajian untuk dapat ditarik kesimpulan guna menjawab isu hukum.

PENYEBAB MENINGKATNYA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN SOLUSI MEMINIMALISIR AGAR TINDAKAN KEKERASAN KEPADA PEREMPUAN TIDAK TERULANG KEMBALI.

Tindakan kekerasan yang ditujukan kepada seseorang termasuk pula kaum perempuan merupakan perbuatan yang keji, tidak manusiawi dan melanggar hak asasi orang lain. Sebab setiap individu pada dasarnya berhak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan dari tindakan diskriminatif oleh siapapun juga dan ini telah dijamin oleh UU HAM. Namun pada kenyataannya, jaminan yang diberikan oleh UU tidaklah cukup untuk mengatasi permasalahan kekerasan yang dialami

perempuan, tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak. Sehingga masih ditemukan perempuan justru menjadi korban yang paling dominan mendapatkan perlakuan dari tindakan kekerasan, baik dalam ranah privat maupun publik.

Kekerasan yang terjadi pada perempuan merupakan suatu tindak penistaan dan pengebirian terhadap harkat martabat perempuan sebagai manusia.⁵ Perbuatan semacam ini termasuk kategori kekerasan karena adanya ketimpangan relasi kekuasaan yang kurang berimbang antara laki-laki dengan perempuan.⁶ Pada hakikatnya penghormatan dan perlindungan hak perempuan secara konsistensi berguna untuk menjaga keselamatan manusia khususnya perempuan secara utuh melalui keseimbangan hak dan kewajiban.⁷ Perlindungan hukum terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan sebagaimana yang telah diatur di dalam berbagai instrumen hukum nasional dan peraturan terkait lainnya bertujuan untuk mencegah terjadinya tindakan diskriminatif dan memberikan rasa adil bagi korbannya.

Mayoritas masyarakat beranggapan penyebab kekerasan adalah masalah ekonomi atau kemiskinan. Padahal persoalan tersebut bukanlah akar penyebab kekerasan, melainkan karena adanya ketimpangan relasi kuasa.⁸ Berdasarkan jenisnya, kekerasan terhadap perempuan dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yakni kekerasan yang terjadi di lingkup personal dan kekerasan di lingkup komunitas/ruang publik.⁹ Berdasarkan bentuknya, kekerasan yang terjadi pada perempuan berupa kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, perdagangan orang, penelantaran dan sebagainya. Kekerasan terhadap fisik, psikis dan seksual merupakan kekerasan yang paling banyak dan sering terjadi setiap tahunnya. Sedangkan berdasarkan tempat kejadian, dapat dibagi menjadi lingkup rumah tangga, fasilitas umum, tempat kerja, sekolah/ perguruan tinggi, lembaga pendidikan kilat. Kekerasan pada lingkup domestik atau rumah tangga merupakan tempat yang paling banyak dan sering terjadi setiap tahunnya.

Adapun faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap perempuan, yakni sebagai berikut:

- a. Kuatnya budaya patriarki di lingkungan masyarakat.

⁵M. Hendra Pratama Ginting, Muhammad Akbar, Rica Gusmarani, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural, Jurnal Law Of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum Vol. II, Nomor 1, Desember 2022, Hlm. 1-10.

⁶Wardhani, K. A. P., Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uupkdr). Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(1), 2021, Hlm. 23.

⁷ Shadrina Khairunnisa Oli'i, Wahyu Donri, Kekerasan Dan Kejahatan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Kejahatan Kemanusiaan, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Juli 2023, 9 (13), Hlm. 608-617.

⁸ Yustina Fendrita Dangandhi Pawitan, Persepsi Masyarakat Terkait Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia, Jurnal Pks Vol.20 No. 2 Agustus 2021, Hlm. 157-170.

⁹ Abdurrahman Alhakim, Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha Vol. 9 No. 1 (Februari, 2021), Hlm. 115-122.

- b. Himpitan kondisi ekonomi keluarga.
- c. Tekanan kehidupan di kota besar yang memicu stres.
- d. Beban pekerjaan dan lingkungan menimbulkan sikap temperamental.
- e. Sosial budaya masyarakat memposisikan perempuan dan anak ke dalam kondisi ketidakberdayaan dan termarjinalkan.¹⁰

Faktor lainnya adalah kesadaran hukum, kemiskinan dan pernikahan dini.¹¹ Dalam konteks budaya kekerasan juga terjadi karena perilaku istri, kondisi kehidupan sehari-hari suami, dan perintah agama.¹² *Pada situasi yang lebih besar, penyebab kekerasan karena faktor ekonomi, politik, sosial, budaya, dan agama yang dipengaruhi rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender antara lelaki dan perempuan dalam berinteraksi sehingga dapat menimbulkan kerugian dari kedua belah pihak. Serta dominasi budaya patriarki dan ketidaksetaraan yang secara sepihak telah melemahkan posisi perempuan dalam kehidupan masyarakat.*¹³

Ada pula pendapat lainnya yang menyatakan bahwa penyebab dari kekerasan pada perempuan dikarenakan masih terjadinya ketimpangan gender, pengetahuan tentang kekerasan, ekonomi keluarga, sikap pasif pada perbuatan kekerasan, kepribadian dari lelaki, komunikasi dalam keluarga, serta faktor budaya yang masih tabu karena kekerasan dalam rumah tangga dianggap aib dan tidak patut diketahui pihak lain.¹⁴ Faktor lainnya seperti kesadaran hukum, kemiskinan dan perselingkuhan.¹⁵ *Serta karakteristik latar belakang seseorang seperti usia dan status perkawinan, pendidikan, mobilitas dan kependudukan turut mempengaruhi timbulnya kekerasan pada perempuan.*¹⁶

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya, ternyata ada beraneka ragam faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi dan sebagai pemicu timbulnya kekerasan terhadap perempuan. Namun faktor-faktor tersebut dinilai masih terkesan abstrak dan umum dalam menerangkan kondisi yang terjadi, belumlah terkelompokan secara komprehensif dan sistematis, sehingga dapat

¹⁰ M. Hendra Pratama Ginting, Muhammad Akbar, Rica Gusmarani, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural, Jurnal Law Of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2, Number 1, Desember 2022, Hlm. 1-10.

¹¹ *Ridawati Sulaeman, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, Sukmawati*, Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan, Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol.8, No. 3 (2022), Hlm. 2311-2320.

¹² *Deffi Syahfitri Ritonga*, Kekerasan Terhadap Perempuan Di Negara-Negara Arab Dan Islam, Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak, 11 (1), 2015, Hlm. 62-75.

¹³ Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, Studi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Di Tangani Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta, Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender (P-Issn: 1412-6095 | E-Issn: 2407-1587 Vol. 18, No. 2, 2019, Hlm. 153-170.

¹⁴ Yulianingsih, Erna Herawati, Budaya, Gender, Dan Kasus Kekerasan Pada Perempuan Di Jawa Barat, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Vol. 24 No. 01 (June 2022), Hlm. 90-99.

¹⁵ Jumrah Dan Rika Damayanti, Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kecamatan Salamekko Kab.Bone. Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik, Vol.11 No. 5, 2022, Hlm. 665-669.

¹⁶ Nl. Meilani, Hesti Asriwandari, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Pekanbaru, Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Keluarga Berencana, Hlm.46-60.

menjadi penghambat penyelesaian persoalan mengenai masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini. Merujuk pada faktor-faktor yang telah dikemukakan sebelumnya, maka faktor tersebut dapat ditelaah dan dibagi menjadi beberapa kategori, yakni berdasarkan:

a. Bentuk kekerasan.

Kekerasan yang terjadi kepada perempuan terdiri dari beberapa macam bentuk, yakni berkenaan dengan fisik dan psikis. Kekerasan terhadap fisik, serangannya ditujukan kepada anggota tubuh melalui sentuhan fisik, non fisik atau menggunakan alat bantu dilakukan secara langsung atau tidak langsung, yang dapat mengakibatkan timbulnya bekas berupa luka ringan, sedang, berat hingga kematian ataupun tidak menimbulkan bekas luka pada anggota tubuh korbannya. Sedangkan kekerasan secara psikis, serangannya ditujukan untuk menciptakan rasa takut, kecemasan, hilangnya kepercayaan diri dan kemampuan bertindak, ketidaknyamanan, ketidakberdaya, penderitaan psikis berat bagi korbannya.

Rendahnya tingkat pemahaman dan literasi masyarakat tentang bentuk kekerasan, menyebabkan perbuatan tersebut terkesan dianggap hal yang biasa. Para pihak yang terlibat terkadang tidak mengetahui atau kurang menyadari, tindakan yang dilakukan tersebut sebenarnya merupakan bagian dari perbuatan terlarang oleh undang-undang. Masih adanya stigma yang menganggap perbuatan yang dilakukan hanya sebatas candaan belaka dan bukanlah bagian dari tindakan kekerasan, lumrah terjadi, dan dapat dimaklumi atau dimaafkan oleh korbannya. Tidak ada ukuran pasti dalam menentukan seberapa patut candaan dianggap sebatas candaan dan dapat dimaklumi, terlebih bila sudah berhubungan dengan tindakan kekerasan yang menimbulkan luka atau trauma bagi korbannya dan itu dilakukan berulang kali. Jangan sampai candaan dijadikan dalih mengaburkan tindakan kesengajaan melakukan kekerasan, agar terhindar dari proses hukum. Sudah sepatutnya pelaku bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya dan apabila terbukti perlu diterapkan sanksi pidana kepadanya.

Apapun bentuk perlakuan yang tidak lazim dilakukan seseorang, dipandang jelek atau jahat oleh hukum dan masyarakat, terlebih jika korbannya mengetahui perbuatan yang diterima merupakan perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum dan telah berlangsung terus menerus, sudah semestinya korban tersebut memberanikan diri mengungkapkan dan melaporkan kejadian yang dialami kepada aparat penegak hukum. Jangan didiamkan, dibiarkan dan menganggap hal semacam itu sebagai perbuatan biasa, yang wajar dilakukan, diterima, dan dimaklumi begitu saja. Sedikit banyak, secara perlahan lama-kelamaan nantinya menjadikan korban merasa resah, gelisah, terbebani yang berujung pada penderitaan fisik maupun psikis. Serta berpotensi perbuatan yang sama terjadi pada orang yang ada disekitaran korban.

b. Tempat terjadinya kekerasan.

Tindakan kekerasan dapat terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja, baik di ranah privat seperti dalam lingkungan keluarga, maupun tempat, sarana atau fasilitas publik seperti halte, bus, terminal, tempat kerja atau tempat lain yang dapat diakses oleh publik atau masyarakat umum termasuk pula dalam ranah siber. Merujuk tempat terjadinya kekerasan, ada beberapa parameter yang mempengaruhi masih tingginya angka kekerasan pada perempuan, yakni *pertama*, lokasi, jarak dan akses ke tempat kejadian. Semakin terisolirnya lokasi, jauhnya jarak dari lokasi kejadian dengan keramaian dan semakin sulitnya akses menuju lokasi kejadian, maka semakin besar pula peluang terjadinya kekerasan dan perbuatan tersebut menjadi semakin sulit pula untuk segera diketahui publik. Karena lemahnya pengawasan, kontrol, atau perhatian dari masyarakat terhadap tempat terjadinya kekerasan. *Kedua*, Situasi dan kondisi pada saat kejadian. Peristiwa kekerasan umumnya terjadi pada suatu keadaan yang lengang, kurang tersedianya perangkat pengawasan *cctv*, malam hari, saat hujan lebat, situasi keramaian yang saling berdesakan, kondisi kehidupan keluarga yang menutup diri atau kurang berinteraksi warga masyarakat. Momen seperti ini menjadi peluang besar bagi pelaku dalam melakukan aksinya, karena sulit dipantau atau diketahui oleh publik dengan segera. *Ketiga*, pola kehidupan lingkungan sekitar tempat tinggal korban. Tinggal di lingkungan yang kehidupan sosialnya buruk, apatis, keras, dan tingkat kriminalitasnya tinggi, dengan sumber penghasilannya tidak menentu membuat lingkungan sekitar menjadi lingkungan yang dekat dengan tindakan kekerasan.

Pada lingkup terkecil, lingkungan keluarga menjadi tempat yang paling dominan terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Karena tempat kejadiannya bersifat privat sehingga informasi adanya kekerasan tidak banyak diketahui publik. Dominasi suami lebih besar daripada istri dan anak. Korban umumnya tidak ingin permasalahan yang dialami diketahui orang publik, disebabkan adanya rasa malu karena dianggap aib keluarga, dan lebih memilih menerima perlakuan kekerasan daripada masalah menjadi lebih rumit. Tetangga umumnya tidak ingin ikut campur urusan keluarga orang lain dan menganggap persoalan tersebut merupakan masalah pribadi kehidupan rumah tangga orang yang kiranya akan terselesaikan dengan sendirinya. Dimungkinkan orang sekitar menolong jika adanya permintaan dari seseorang atau korban kekerasan karena teriakannya maupun komunikasi dalam bentuk lainnya, yang menginformasikan telah terjadinya tindakan kekerasan di tempat tersebut. Sedangkan bagi korban yang berada ditempat sarana, atau fasilitas umum yang ramai, perbuatan tersebut justru dengan mudah diketahui dan direspon oleh orang-orang sekitar lokasi kejadian untuk tergerak membantu korban dan mengamankan pelakunya.

Tindakan kekerasan seringkali dilakukan oleh orang-orang terdekat korban, yang semestinya melindungi dan memberikan contoh baik, tapi pada

kenyataannya justru menjadi perusak fisik dan mental korbannya. Namun tidak menutup kemungkinan pula, perbuatan ini dilakukan oleh orang yang tidak dikenal korban. Dimanapun tempatnya, tidaklah menjadi penghalang bagi pelaku untuk melakukan aksinya. Sebab pelaku dapat saja mengintervensi, mengintimidasi, dan menaku-nakuti korban atau orang yang berada di sekitar tempat kejadian, supaya jangan merintanginya melalui ancaman secara verbal maupun menggunakan sarana alat bantu. Sehingga memungkinkan seseorang lebih memilih menghindari masalah demi menjaga keselamatan diri, dari pada turun tangan secara langsung membantu korbannya. Peran dan dominasi pelaku berdasarkan tempat sangat mempengaruhi terwujud tidaknya tindakan kekerasan dimaksud. Semakin diamnya korban dan pasifnya orang-orang sekitar tempat kejadian, maka semakin besar pula peluang akan peristiwa serupa terulang kembali, karena para pelaku merasa perbuatan yang dilakukan merupakan urusan pribadinya dan tidak berhak orang lain untuk ikut campur, ataupun dianggap bukanlah merupakan perbuatan yang tercela. Oleh karenanya penindakan secara hukum perlu dilakukan agar menimbulkan efek jera kepada diri pelaku kekerasan tersebut.

c. Sosial.

Tingginya angka kekerasan pada perempuan, tidak terlepas dari masih kurangnya perhatian masyarakat terhadap permasalahan yang dialami para perempuan sebagai korban kekerasan di lingkup privat maupun publik. Minimnya intensitas pertemuan, interaksi, komunikasi antar sesama individu, kemudian padatnya aktivitas atau mobilitas dari pekerjaan masing-masing, dapat memicu timbulnya sikap individualis dan terkesan lebih mementingkan urusan pribadi dibandingkan dengan menjaga dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

Berkurangnya rasa simpati dan empati terhadap situasi kondisi yang dialami korban kekerasan karena merasa bukan bagian dari pihak yang berkonflik. Tidak ingin tahu maupun terlibat terlalu jauh dengan permasalahan yang dihadapi korban, karena takut akan memperparah situasi atau mendapatkan masalah baru yang dapat mengancam keselamatan jiwa, raga dan harta benda yang dimiliki. Hilangnya rasa saling memiliki sebagai akibat terjadinya perubahan sosial begitu cepat, namun tidak diimbangi dengan kecepatan perubahan pada sistem sosial dan nilai dalam kehidupan masyarakatnya. Adanya pengabaian terhadap norma dan nilai sosial yang berlaku di dalam masyarakat sehingga kehidupan sosial tersebut menjadi tidak sehat dan mengarahkan diri pada sikap anti sosial.

Pembiaran seperti ini sebenarnya tidak akan memperbaiki situasi dan kondisi perempuan yang mengalami korban kekerasan, justru ini membuka ruang untuk memperburuk situasi, kondisi dan kedudukan perempuan dalam

kehidupan masyarakat. Sebab, masih adanya stigma yang melekat dan menempatkan perempuan sebagai seseorang yang patut dipersalahkan atas peristiwa kekerasan yang dialaminya tersebut, karena perempuan dianggap lemah dalam menjaga diri, harkat dan martabat keluarga, kurang berpengalaman dan tidak informatif, tidak bisa mengurus dan merawat anak dengan baik, boros, sulit diatur, kurang perhatian kepada suami, cengeng, berselingkuh, berpenampilan menggoda, keras kepala dan stigma negatif lainnya. Penempatan stigma negatif terhadap perempuan dalam posisi ini tidaklah patut dapat dibenarkan, karena perempuan dan laki-laki memiliki hak dan peran yang sama dalam kehidupan sosial. Apapun perlakuan, rupa dan penampilannya perempuan, bukanlah menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan kedudukan yang sama seperti laki-laki dalam kehidupan sosial. Semakin kuatnya stigma negatif terhadap perempuan yang hidup dalam masyarakat, maka semakin termarginalkan pula posisi perempuan untuk memperoleh kesetaraan dan keadilan.

d. Budaya.

Budaya pada prinsipnya merupakan warisan yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang masih dipertahankan hingga sekarang dan melekat dalam kebiasaan hidup masyarakat. Salah satunya yakni masih bertahannya budaya patriarki. Budaya ini pada prinsipnya menganggap lelaki memiliki otoritas kekuasaan atas istri, anak dan harta benda yang dimilikinya, sehingga menempatkan posisi lelaki sebagai pemimpin atau penguasa dalam rumah tangga. Di lain sisi seorang suami perlu melindungi dan menjaga istri, anak dan harta yang dimiliki dari berbagai macam gangguan serangan yang datang dari dalam maupun luar. Menyematkan lelaki sebagai seorang pemimpin tidaklah salah, tapi menempatkan posisinya sebagai orang yang kuat, berkuasa dan serba benar, dengan segala tindakan yang diambilnya seakan-akan selalu tepat, termasuk pandangan yang kurang tepat. Ini dapat menghilangkan eksistensi kehadiran peran serta perempuan dalam kehidupan masyarakat yang berbudaya.

Dominasi lelaki yang terlalu besar tanpa adanya pengawasan maupun teguran atas kesalahan yang diperbuatnya, dapat menyebabkan timbulnya bias gender. Seperti terjadinya subordinasi yang menganggap perempuan cukup bekerja di ranah domestik mengurus urusan rumah tangga, sedangkan lelaki bekerja di luar untuk mencari nafkah. Namun tidak jarang perempuan juga turut serta membantu suaminya dalam memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara bekerja di luar rumah, sehingga perempuan memperoleh beban ganda atas pekerjaannya tersebut karena bekerja diluar rumah untuk mencari nafkah dan juga di dalam rumah untuk menyiapkan segala kebutuhan keluarga. Selain itu, memandang perempuan sebagai pihak yang tidak tidak kompeten dan lemah hanya akan memberikan cap jelek yang membuat perempuan selalu berada

dalam posisi termarginalkan. Padahal kenyataannya tidaklah begitu, baik laki-laki dan perempuan memiliki hak dan peran yang sama untuk berbagai macam aktivitas sosial.

Kekeliruan cara pandang terhadap perempuan baik karena identitas, suku, ras, agama, dan adat istiadatnya, berakibat terhambatnya perempuan dalam memperoleh ruang dan kesempatan yang sama seperti lelaki pada umumnya. Beda halnya jika peran tersebut telah ditentukan secara tegas dari kepercayaan/keyakinan agama tertentu atau karena kodratnya sebagai manusia yang tidak mungkin bisa tergantikan oleh lelaki, seperti mensturasi, mengandung, melahirkan dan menyusui. Sepanjang perannya tidak menyalahi kodratnya sebagai perempuan dan tidak bertentangan dengan ajaran agama, sudah semestinya perempuan dihargai kedudukan dan posisinya yakni setara dengan para laki-laki.

e. Ekonomi.

Setiap individu mengharapkan kehidupan yang layak, sejahtera dan tercukupi segala macam kebutuhan hidupnya. Untuk itu diperlukan suatu manajemen yang baik dalam mengatur kehidupan ekonomi. Sebab tidak semua individu terlahir, tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang berada atau layak secara ekonomi. Adakalanya individu harus berjuang keras merintis dan jatuh bangun dalam memenuhi kondisi ekonomi diri pribadi dan keluarga, yang disebabkan oleh kemiskinan, pengangguran, gizi buruk, kesehatan, pembangunan tidak merata, dan kesenjangan ekonomi. Kondisi tersebut memaksa perempuan harus bekerja ekstra membantu mencari nafkah, guna mencukupi pemenuhan kebutuhan rumah tangga, yang tidak jarang mendapatkan penolakan dari orang terdekat ataupun diperlakukan secara diskriminatif karena dianggap tidak memiliki kompeten, lemah, tidak profesional, mudah terbawa perasaan saat bekerja, dan lain sebagainya.

Berdasarkan faktor ekonomi, Setidaknya ada beberapa bentuk kekerasan yang umumnya terjadi kepada perempuan, yakni perempuan tidak mendapatkan izin untuk memiliki penghasilan sendiri, jika bekerja pada usaha keluarga tidak mendapatkan upah, penghasilannya dirampas atau dieksploitasi untuk kepentingan pelaku, dan/atau yang lebih parahnya, membuat kondisi korban tidak layak bekerja hingga kehilangan pekerjaan. Perempuan dijadikan objek yang selalu ketergantungan ekonomi kepada pasangannya. Bentuk perlawanan yang keliru yang dilakukan perempuan, dapat menyulutkan konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga.

Tidak tercapainya kondisi ideal yang diharapkan dan dominasi lelaki yang bersifat menguasai juga dapat memicu timbulnya konflik, pemikiran sesat, dan tindakan yang salah sehingga menyebabkan pelaku secara sadar atau tidak, berani untuk melakukan tindakan kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Sebagai bentuk pelampiasan atas kegelisan tersebut, maka pihak yang lemah

berpotensi untuk menjadi korbannya dengan cara pelaku menyakiti secara fisik maupun non fisik korbannya pada saat itu tanpa berfikir panjang. Atas tindakan yang dilakukan pelaku semestinya perlu diberikan shock therapy sesaat, agar pelaku menginsyafi akan perbuatan yang dilakukannya adalah salah.

KESIMPULAN

Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kekerasan seksual, tempat kejadian jauh dari pantauan masyarakat, kehidupan sosial yang tidak sehat, budaya patriarki yang masih dominan, kehidupan ekonomi yang kurang stabil, pendidikan, agama dan kepribadian yang merosot. Perlu adanya peran serta seluruh pihak agar akar permasalahan tersebut dilakukan pembenahan secara maksimal menuju ke arah yang lebih baik, sehingga kedepannya tidak ada lagi kekerasan yang dialami perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman Alhakim, Kekerasan Terhadap Perempuan: Suatu Kajian Perlindungan Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 9 No. 1 (Februari, 2021), Hlm. 115-122.
- Anisa, M. Fedryansyah, Meilanny Budiarti Santoso, Strategi Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Situasi Bencana (Studi Kasus Penerapan Strategi Pencegahan Dp3akb Jabar), *Share: Social Work Jurnal*. Vol. 10. No. 2. Hal. 175 - 185.
- Deffi Syahfitri Ritonga, Kekerasan Terhadap Perempuan Di Negara-Negara Arab Dan Islam, *Harkat: Media Komunikasi Islam Tentang Gender Dan Anak*, 11 (1), 2015, Hlm. 62-75.
- Dini Zulfiani Indrawati, Oktavianus Kondorura, Meuthia Sahda Af, Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Provinsi Kalimantan Timur, *Jurnal Administrative Reform*, Vol.6, No. 3, September 2018, Hlm. 141-152.
- Jumrah Dan Rika Damayanti, *Faktor Penyebab Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kecamatan Salamekko Kab.Bone*. *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Vol.11 No. 5, 2022, Hlm. 665-669.
- Kemenpppa Go.Id, Data Kekerasan, <https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan> Diakses 1 Februari 2024.
- M. Hendra Pratama Ginting, Muhammad Akbar, Rica Gusmarani, Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum Dan Sosiokultural, *Jurnal Law Of Deli Sumatera Jurnal Ilmiah Hukum* Vol. Ii, Number 1, Desember 2022, Hlm. 1-10.
- Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid, Studi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Di Tangani Rifka Annisa Woman Crisis Center Yogyakarta, Marwah:

Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 23, No 1, April 2024, 137-149

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.36406>

Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender (P-Issn: 1412-6095|E-Issn: 2407-1587 Vol. 18, No. 2, 2019, Hlm. 153-170.

Nl. Meilani, Hesti Asriwandari, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Pada Perempuan Di Kota Pekanbaru, Vol. 4 No. 1 (2019): Jurnal Keluarga Berencana, Hlm.46-60.

Okta Windya Ningrum, Yana S. Hijri, Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah), Jurnal Inovasi Dan Kreatifitas (Jika) Vol. 1 No. 2 September 2021, Hlm. 109-125.

Ridawati Sulaeman, Ni Made Wini Putri Febrina Sari, Dewi Purnamawati, Sukmawati, Faktor Penyebab Kekerasan Pada Perempuan, Aksara: Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal, Vol.8, No. 3 (2022), Hlm. 2311-2320.

Shadrina Khairunnisa Oli'i , Wahyu Donri, Kekerasan Dan Kejahatan Seksual Pada Perempuan Dalam Perspektif Kejahatan Kemanusiaan, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Juli 2023, 9 (13), Hlm. 608-617.

Wardhani, K. A. P., *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdr) Pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. . 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Uupkdr)*. Jurnal Riset Ilmu Hukum, 1(1), 2021, Hlm. 23.

Yulianingsih, Erna Herawati, Budaya, Gender, Dan Kasus Kekerasan Pada Perempuan Di Jawa Barat, Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, Vol. 24 No. 01 (June 2022), Hlm. 90-99.

Yustina Fendrita Dangandhi Pawitan, Persepsi Masyarakat Terkait Kekerasan Terhadap Perempuan Di Indonesia, Jurnal Pks Vol.20 No. 2 Agustus 2021, Hlm. 157-170.